

IMPLEMENTATION OF SWEDIA INDONESIA SUSTAINABILITY PARTNERSHIP (SISP) 2017-2021

Oleh : Raka Mussada

Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.I.P,M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The sustainable development phenomenon Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) aims to strengthen partnerships between stakeholders in Indonesia and Sweden in line with the 2030 Agenda. Sweden is leading the global transition towards innovative and sustainable solutions and can play an important role in Indonesia's ambition to achieve the goals of the 2030 Agenda, become a regional centre for manufacturing industries and become a high-income country. These ambitious targets, in line with President Jokowi's reform agenda, create significant opportunities for Swedish companies across the value chain.

This research uses a Liberalism perspective and uses the nation state level of analysis. This study uses the theory of Development Theory, the conditions of development in this study refer to the theory by Todaro and Smith that development should be seen as a multidimensional process, which includes a variety of fundamental changes or social structures, public attitudes, and national institutions in addition to pursuing accelerated economic growth, addressing income inequality, and poverty alleviation through the Sweden-Indonesia Sustainability Partnership. The analysis will use official sources from the Ministry of Foreign Affairs, United Nations, BPK RI, and the Government Office of Swden.

The research shows that the implementation of the Sweden-Indonesia Sustainability Partnership created by the Indonesian government and the Swedish government is the signing of four memoranda of understanding (MoUs) in the series of Sweden-Indonesia Sustainability Partnership events that took place on 6-8 December 2023 in Jakarta.

Keywords: Sweden, Indonesia, Sustainable Development, Implementation, MoU.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup saat ini dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah menjaga kualitas hidup seluruh umat manusia secara berkelanjutan saat ini dan di masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan holistik.¹

Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan. Dampak buruk terhadap lingkungan harus dihindari dari setiap kegiatan sosial dan ekonomi agar lingkungan tetap terjaga di masa sekarang dan di masa yang akan datang.² Hubungan internasional erat kaitannya dengan kerjasama. Kerjasama dilakukan antar negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya di dunia internasional. Kerjasama pembangunan berkelanjutan menjadi isu yang sedang banyak diperbincangkan

Swedia merupakan salah satu negara yang berambisi akan menjadi pemimpin dalam mengimplementasikan Agenda 2030, baik di dalam negeri maupun dengan berkontribusi pada implementasi globalnya. Sebuah titik awal bagi Swedia adalah bahwa pelaksanaan Agenda 2030 melibatkan proses

¹ Widjajanti, dkk. (2014). Pemahaman Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan: Rekomendasi Nasional dan Panduan Bagi Pengambil Kebijakan dan Pendidik (PDF). Yayasan Pembangunan Berkelanjutan dan United Nations of Environment Programme. hlm. 16.

² Alisjahbana, A. S., dan Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi* (PDF). Bandung: Unpad Press. Hlm. 44

transformasi berturut-turut dan pengembangan lebih lanjut dari model masyarakat Swedia sebagai negara kesejahteraan modern dan berkelanjutan, secara nasional dan sebagai bagian dari sistem global. Proses ini harus merangkul semua orang di Swedia, dan tidak ada yang tertinggal. Swedia melihat Agenda 2030 dan tujuan global, perjanjian iklim yang mengikat secara hukum disimpulkan di Paris pada Desember 2015, dokumen hasil dari Konferensi Internasional tentang Pembiayaan Pembangunan, Agenda Aksi Addis Ababa pada Juli 2015, dan Kerangka Sendai untuk Risiko Bencana Pengurangan 2015-2030 sebagai bagian yang koheren dari kerangka global baru untuk pembangunan berkelanjutan³

Sebagai negara tropis dan negara berkembang, Indonesia menjadi salah satu negara yang berpartnership dalam Agenda 2030 ini. Indonesia dan Swedia menyepakati kerja sama dalam beberapa bidang dalam Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP). Kerja sama tersebut sepakat dalam lima bidang yakni Pembangunan Berkelanjutan dan Penciptaan Lapangan Kerja, Transportasi Cerdas, Energi Terbarukan, Ekonomi Biru, dan Industri 4.0.

Kedua negara tersebut mengakui pentingnya kerja sama untuk transisi hijau dan pemulihan pasca Covid-19. Menurut Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Timor-Leste, Papua Nugini, dan ASEAN Marina Berg, yang dilansir Jawa Pos,t pada saat yang sama, perubahan iklim tidak akan membaik tanpa intervensi bersama. Sekaranglah waktunya untuk memikirkan kembali pembangunan. Pentingnya bekerja sama antarnegara untuk mengatasi pandemi ini dan perlu memastikan pemulihan yang lebih kuat, lebih hijau dan berkelanjutan untuk semua.⁴

³ Ibid

⁴ Marieska Harya Virdhani, 2021, <https://www.jawapos.com/internasional/23/11/2021/swedia-indonesia-perkuat-kerja-sama-dalam-lima-bidang-ini/>

Dalam SISP 2021, Indonesia dan Swedia akan berdiskusi lebih lanjut untuk menemukan solusi berkelanjutan dan mencapai Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Duta Besar Indonesia untuk Swedia dan Latvia HE Kamapradipta Isnomo mengatakan kegiatan tersebut memperingati 70 tahun hubungan baik antara kedua negara. Tahun ini, kedua negara memperkuat komitmen untuk menumbuhkan hubungan, serta menjadi landasan kerja sama yang konstruktif dan saling menguntungkan di tahun mendatang.⁵

Swedia telah melakukan bantuan pembangunan internasional yang ekstensif sejak tahun 1970-an, dan sejak tahun 2006 bantuan Swedia berjumlah sekitar 1 persen dari GNI setiap tahunnya. Pada bulan Desember 2016, Pemerintah mempresentasikan kerangka kebijakan baru untuk kerjasama pembangunan Swedia dan bantuan kemanusiaan, berdasarkan Agenda 2030 dan tujuan pembangunan berkelanjutannya. Kerja sama pembangunan berfungsi sebagai katalis dan berkontribusi dalam menciptakan kondisi untuk arus keuangan yang lebih besar, pertukaran pengetahuan dan investasi berkelanjutan dengan partisipasi luas. Ini juga memiliki fungsi penting untuk membiayai daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam menarik sumber daya sendiri.⁶

Dikutip dari situs SDGS Indonesia, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Indonesia

⁵ SISP Day 1 - SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND JOB CREATION. Sweden Jakarta. Melalui <https://www.youtube.com/watch?v=1YVCP74CkWA>

⁶ Ibid

adalah negara demokratis terbesar dengan 250 juta penduduk yang terdistribusi di 34 propinsi dan 514 propinsi. Sejak tahun 2000, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerah mereka.⁷

Melihat situasi-situasi yang ada, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu **Mengapa Swedia Membantu Indonesia dalam Kerjasama Indonesia Bidang Pembangunan Kelanjutan?**

KERANGKA TEORI

Penelitian ini akan menggunakan teori yang relevan untuk menghantarkan tulisan ini pada penjelasan yang sistematis mengenai permasalahan yang akan dibahas. Teori menjadi sarana yang membantu untuk menata fakta-fakta yang terdapat pada sebuah penelitian dan menjadi landasan atau acuan peneliti.

Penggunaan teori pada tulisan ini disesuaikan dengan perspektif dan tingkat analisis yang digunakan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan perspektif Liberalisme yang dijelaskan oleh Mansbach dan Rafferty, mempercayai bahwa dalam aspek politik, aktor dapat mendapatkan untung bersama atau mendapat kerugian bersama yang dikenal dengan variable-sum game. Kelompok liberalisme juga menekankan pemenuhan aktor atas keuntungan absolutnya (absolute gains), yaitu kondisi di mana semua aktor mendapatkan keuntungan dari suatu hubungan internasional.⁸

Teori yang digunakan adalah teori Teori Pembangunan, kondisi pembangunan dalam penelitian ini mengacu pada teori oleh Todaro dan

⁷

<https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>, diakses pada 18 Oktober 2022, pukul 14.21 WUb

⁸ Mansbach, Richard W. dan Rafferty, Kirsten L. 2008. *Introduction to Global Politics*. New York: Routledge. Hl. 26

Smith bahwa pembangunan harus dipandang suatu proses multidimensional, yang mencakup berbagai perubahan mendasar atau struktur social, sikap-sikap masyarakat, dan institusi institusi nasional di samping mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.⁹ Pembangunan harus merefleksikan perubahan total suatu masyarakat untuk bergerak maju menuju kondisi kehidupan yang lebih baik, secara meteril maupun spiritual.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Bilateral Indonesia-Swedia

Hubungan bilateral Indonesia-Swedia telah diperdalam di beberapa bidang, termasuk energi, transportasi, dan pendidikan. Nota Kesepakatan (MoU) dari ketiga sektor ini ditandatangani pada 2017. Model bisnis perusahaan Swedia harus didasarkan pada pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini juga dilakukan dalam kerja sama Indonesia-Swedia.¹¹ Indonesia dan Swedia, bersama dengan 191 negara lainnya, telah berjanji untuk mencapai TPB. Tujuan Ini harus dicapai untuk mengakhiri kemiskinan, menjaga lingkungan, dan memastikan bahwa pada 2030 semua orang bisa menikmati perdamaian dan kemakmuran.

Demikian halnya dengan Indonesia, yang melakukan kerjasama pertahanan dengan Swedia dalam upaya peningkatan pertahanan dan keamanan Indonesia. Secara umum Indonesia dan Swedia mempunyai kepentingan yang sama. Platform politik kedua negara peduli demokrasi dan HAM, kebijakan ekonomi yang transparan serta penghormatan kepada kebudayaan telah

menjadikan hubungan antara Indonesia dan Swedia semakin baik. Dalam berbagai pernyataan kedua negara selalu membahas isu-isu bilateral, regional, perkembangan domestik, multilateral, dan global dengan berbagai macam pokok bahasan.

Indonesia dipandang Swedia sebagai negara yang demokratis dan telah melewati Pemilu yang terbuka. Indonesia juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Terkait dengan perkembangan Swedia sendiri, Swedia selalu menjelaskan hubungan diplomatiknya dengan Arab Saudi, Israel dan Palestina. Hubungan Swedia dengan dengan kedua negara sebagaimana disebut terakhir sudah membaik. Hal ini ditandai dengan kembali bertugasnya Dubes Arab Saudi, dan Israel untuk Swedia di Stockholm yang sebelumnya ditarik ke negara masing-masing.

Swedia merayakan Hari Nasional pada tanggal 6 Juni 2019, sedangkan Indonesia juga merayakan Hari Nasional pada tanggal 17 Agustus 2019. Tahun ini menandai peringatan 69 tahun hubungan diplomatik dengan Swedia. 69 tahun terakhir telah terbukti membuahkan hasil tidak hanya bagi hubungan politik tetapi juga ekonomi antara kedua negara. Kunjungan resmi tokoh-tokoh penting dari kedua negara menunjukkan pentingnya hubungan kedua negara. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Stockholm pada tahun 2013 bersama Raja Carl Gustav XVI dari Swedia melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada tanggal 22 Mei 2017. Ikatan diplomatik dan politik secara alamiah akan menghasilkan ikatan ekonomi yang lebih kuat. Kedua negara demokrasi ini telah dibentuk dengan cara yang unik sejak terjalannya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Swedia pada tahun 1952. Kemitraan ini telah berkembang menjadi lebih dari sekedar persahabatan antara dua negara demokrasi dan para pemimpinnya. Secara

⁹ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan Jilid 1, Erlangga, 2006, h.22.z

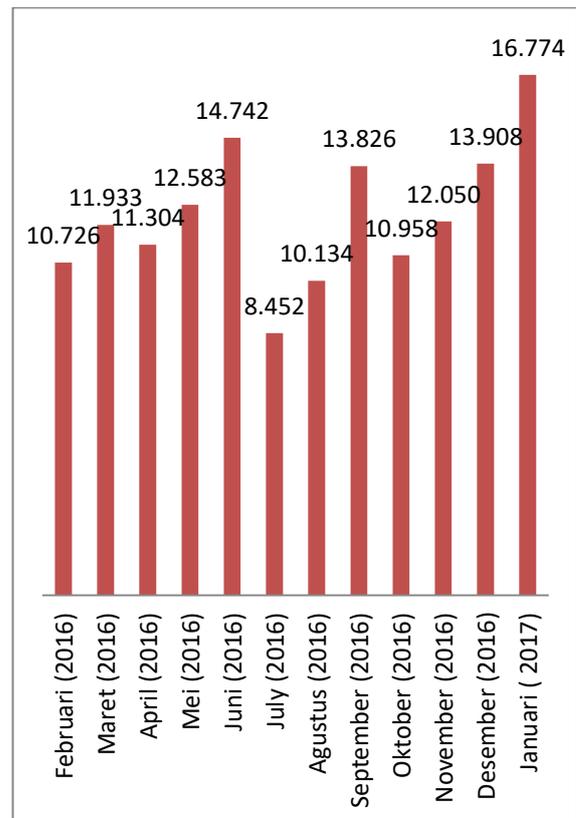
¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

keseluruhan, hubungan ini sangat penting bagi geopolitik. Ekspor Indonesia ke Swedia meningkat dari \$13,91 juta pada bulan Desember 2016 menjadi \$16,77 juta pada bulan Januari. Ekspor Indonesia ke Swedia rata-rata mencapai USD 13,03 juta dari tahun 2014 hingga 2017, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar USD 38,31 juta pada bulan Desember 2014 dan rekor terendah sebesar USD 8,45 juta pada bulan Juli 2016.¹²

Sejak tahun 2017, Indonesia dan Swedia telah menandatangani beberapa Nota Kesepahaman yang mulai berlaku pada bulan Mei 2017. Indonesia telah mengubah fokus politiknya dan mengupayakan kerja sama yang lebih intensif. Beberapa bidang fokus mengarah pada hubungan ekonomi yang lebih erat antara Indonesia dan Swedia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asean, kaya akan sumber daya alam, memiliki posisi demografis yang menguntungkan, dan dengan pertumbuhan kelas menengah yang pesat yang mendorong konsumsi domestik, Indonesia tidak diragukan lagi merupakan tujuan bisnis dan investasi yang menjanjikan. Pada tahun 2019 menandai peringatan 69 tahun hubungan diplomatik dengan Swedia telah terbukti membuahkan hasil tidak hanya bagi bidang politik tetapi juga bagi hubungan ekonomi kedua negara.¹³

Grafik 3.1 Ekspor Indonesia ke Swedia



Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Seperti yang dapat kita lihat grafik diatas, ekspor ke Swedia di Indonesia meningkat menjadi 16,77 USD Juta di bulan Januari dari 13,91 USD Juta di bulan Desember 2016. Ekspor ke Swedia di Indonesia rata-rata sebesar 13,03 USD juta dari tahun 2014 hingga 2017, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 38,31 USD juta pada bulan Desember 2014 dan rekor terendah sebesar 8,45 USD juta pada bulan Juli 2016.

Sejak tahun 2017, Indonesia dan Swedia telah menandatangani beberapa Nota Kesepahaman yang mulai berlaku pada bulan Mei 2017. Indonesia telah mengubah fokus kebijakan, mencari kerja sama yang lebih maju. Beberapa fokus menunjukkan hubungan ekonomi yang lebih dalam antara Indonesia dan Swedia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar

¹² Bagas Hapsoro, "Sweden-Indonesia: Shared Experiences, Shared Outlook", diakses dari <https://kemlu.go.id/stockholm/en/news/1015/sweden-indonesia-shared-experiences-shared-outlook>, diakses pada 26 Februari 2024, pukul 07:11 WIB

¹³ Ibid

di ASEAN, kaya akan sumber daya alam, memiliki posisi demografis yang baik, dan dengan kelas menengah yang berkembang pesat sehingga meningkatkan konsumsi domestik, Indonesia tidak diragukan lagi merupakan tujuan yang menjanjikan untuk bisnis dan investasi.¹⁴

Pada tanggal 20 Mei 2018, Swedish Institute menyelenggarakan sebuah forum yang dihadiri oleh dua "unicorn" Indonesia, Bukalapak dan Gojek. Kedua perusahaan ini mendapat manfaat besar dari teknologi yang dikembangkan dan diteliti di Swedia. Indonesia menduduki peringkat ke-36 dalam Laporan Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia 2017-2018, meningkat dari peringkat ke-41 pada tahun 2017. Berdasarkan Peringkat Daya Saing Dunia IMD (*International Institute for Management Development*) bulan Mei 2019, Indonesia telah meningkatkan peringkatnya secara signifikan ke peringkat 32, mencatat peningkatan terbesar di kawasan ini karena peningkatan efisiensi di sektor pemerintahan dan perbaikan infrastruktur serta kondisi bisnis. Dampaknya bagi perusahaan Swedia telah mengalami pertumbuhan positif selama tiga tahun terakhir. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Business Sweden di Jakarta pada bulan Agustus 2018, perusahaan-perusahaan Swedia telah berkembang pesat di tengah perekonomian Indonesia yang berkembang. Menurut penelitian tersebut, teknologi inovatif dan kualitas produk terus menjadi keunggulan kompetitif utama perusahaan Swedia di Indonesia. Bapak Yudhoyono dan Bapak Reinfeld selanjutnya menghadiri acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) on Sustainable

Urban Development di kediaman resmi Perdana Menteri Rosenbart.¹⁵

Gambaran Umum Pembangunan Berkelanjutan Indonesia-Swedia

Swedia merupakan negara paling awal dalam hal pemikiran pembangunan berkelanjutan. Pada awal tahun 1990-an. Hingga saat itu, fokusnya adalah pada dimensi ekologi dari keberlanjutan. Catatan mengenai pendekatan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa laporan tahunan dari tahun 1998 hingga Pemerintah mempresentasikan strategi nasional pertama untuk pembangunan berkelanjutan pada tahun 2002. Sehubungan dengan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, strategi tersebut - "Strategi Swedia untuk pembangunan berkelanjutan" - direvisi pada tahun 2004 dan pada bulan Maret 2006, Pemerintah mempresentasikan strategi terbaru untuk pembangunan berkelanjutan: "Tantangan-tantangan strategis: Penjabaran lebih lanjut dari strategi Swedia untuk pembangunan berkelanjutan". Pemerintah berencana untuk merevisi strategi tersebut sekali lagi pada tahun 2010. Strategi yang direvisi ini disiapkan oleh unit koordinasi khusus untuk pembangunan berkelanjutan bekerja sama dengan kelompok kerja lintas kementerian, yang dibagi menjadi empat kelompok kerja yang lebih kecil - satu kelompok kerja untuk setiap isu strategis yang diidentifikasi untuk masa depan, karena *Sweden Development* (SD) merupakan isu lintas sektoral, dan karena proses kerja di kantor-kantor pemerintah didasarkan pada pengambilan keputusan bersama yang melibatkan seluruh kementerian, maka seluruh kementerian

¹⁴ Ibid

¹⁵ Bagas Hapsoro, "Sweden-Indonesia: Shared Experiences, Shared Outlook", diakses dari <https://kemlu.go.id/stockholm/en/news/1015/sweden-indonesia-shared-experiences-shared-outlook>, diakses pada 26 Februari 2024, pukul 07:11 WIB

dilibatkan dalam penyusunan strategi keberlanjutan.¹⁶

Pemerintah menunjukkan empat tantangan strategis yang harus diprioritaskan selama masa jabatan berikutnya. Tantangan-tantangan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari isu-isu masa depan yang diidentifikasi dalam revisi strategi Pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan pada tahun 2004. Tantangan-tantangan ini dianggap menentukan untuk mencapai tujuan Swedia dan mewujudkan visi masyarakat yang berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut adalah:¹⁷

- membangun masyarakat yang berkelanjutan (mempromosikan kehidupan yang baik)
- mendorong kesehatan yang baik dengan persyaratan yang setara (menciptakan kondisi kesehatan yang baik untuk semua orang)
- memenuhi tantangan demografi (mengambil langkah-langkah di berbagai kebijakan), dan
- mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (pengakuan bahwa pertumbuhan didorong oleh pasar yang dinamis, kebijakan kesejahteraan yang berwawasan ke depan, dan kebijakan lingkungan yang progresif).

Pemerintah Swedia telah menyatakan dengan jelas bahwa Swedia bertujuan untuk menjadi pemimpin dunia dalam implementasi Agenda 2030. Agenda 2030 telah dimasukkan dalam setiap Pernyataan Kebijakan Pemerintah sejak pada tahun 2015. Sejak tahun 2017, Swedia telah mengambil beberapa inisiatif politik dan keputusan untuk mendorong implementasi yang lebih kohesif. Implementasi agenda 2030 sebagai bagian dari tujuan ambisius negara tersebut untuk mewujudkan SDG.

¹⁶ <https://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation-2009-2-page-157.htm>,

diakses pada 25 Februari Pukul 20:21

¹⁷ Ibid

Hal-hal tersebut antara lain menunjuk delegasi untuk agenda 2030, menerbitkan rencana aksi untuk agenda 2030, menunjuk koordinator nasional untuk agenda 2030 dan menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan agenda 2030. Swedia berkontribusi pada implementasi internasional agenda 2030 melalui beberapa inisiatif dan politik dan kemitraan, termasuk kebijakan luar negeri feminis dan dorongan untuk Demokrasi. Selain inisiatif-inisiatif ini, Pemerintah Swedia juga telah menugaskan berbagai lembaga pemerintah untuk melakukan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan Agenda 2030 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang yang lebih baik tentang tantangan yang masih ada. pemerintah sejak tahun 2017 dan juga menyoroti tantangan-tantangan yang tantangan yang harus diatasi oleh Swedia di masa depan yang perlu diatasi untuk mencapai SDGs.

Sejak pertengahan tahun 1960an hingga pertengahan tahun 1990an, PDB Indonesia tumbuh rata-rata lebih dari 6% per tahun. Setelah krisis keuangan Asia tahun 1997-1998, perekonomian menurun tajam, namun pertumbuhan ekonomi pulih hingga rata-rata lebih dari 5% dalam 10 tahun dari tahun 2000 hingga 2009. Setelah sedikit perlambatan pertumbuhan PDB pada tahun 2009 karena rendahnya permintaan global, pertumbuhan PDB kembali meningkat menjadi 6,2% pada tahun 2010 dan 6,5% pada tahun 2011. Namun, PDB per kapita masih rendah yaitu \$4,094 pada harga KPS tahun 2005, tingkat pengangguran (7,1% dari total angkatan kerja pada tahun 2010), dan tingkat kemiskinan (18,1% penduduk pada tahun 2010 mempunyai pendapatan harian dari pekerja anak (18,1% penduduk pada tahun 2010 mempunyai pendapatan harian dari KPS). 6,6% anak usia 7 hingga 14 tahun bekerja pada tahun 2009). Hal ini merupakan masalah

sosial ekonomi serius yang dihadapi Indonesia (Bank Dunia 2012).¹⁸

Dalam 30 tahun, PDB riil meningkat hampir empat kali lipat dari \$794,27 triliun pada tahun 1990 (konstanta 2010) menjadi \$3,046 triliun pada tahun 2018. Produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh sebesar \$5.163 triliun pada tahun 2030. Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan perekonomian terkuat pada tahun 2030. Perkembangan ekonomi yang luar biasa ini dibarengi dengan peningkatan taraf hidup, sehingga berdampak pada peningkatan PDB riil per kapita dan perubahan struktural pada perekonomian Indonesia. Perubahan ini tercermin pada peningkatan pangsa sektor manufaktur dan jasa terhadap PDB, serta penurunan pangsa sektor pertanian. Perkembangan ekonomi ini juga mendorong munculnya ekonomi digital yang mempersiapkan Indonesia menghadapi era industri 4.0. Perekonomian Indonesia berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun pertumbuhan ini juga membawa tantangan lain karena membawa dampak lingkungan dan sosial seperti polusi, penggundulan hutan, dan kesenjangan pendapatan. Luas hutan Indonesia telah berkurang secara signifikan, hampir separuh hutannya hilang dalam kurun waktu 50 tahun, dan Indonesia kini menjadi negara dengan proporsi sampah plastik laut tertinggi kedua setelah Tiongkok. Selain permasalahan lingkungan hidup, Indonesia masih berjuang mengatasi permasalahan kesenjangan dalam perekonomiannya yang sedang berkembang pesat. Ketimpangan pendapatan meningkat pesat sejak tahun 2000, dengan indeks

Gini meningkat dari 28,5 dari tahun 2000 menjadi 38,1 pada tahun 2017.¹⁹

Peralihan dari sektor pertanian ke sektor manufaktur menyebabkan tingginya tingkat urbanisasi. Pada tahun 2015 kebanyakan orang tinggal di wilayah metropolitan berpenduduk 53,3% penduduk tinggal di wilayah perkotaan, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 63,4% pada tahun 2030 (BPS). Perkembangan ekonomi yang pesat juga membawa perubahan pada struktur sosial ekonomi Indonesia. Ketika taraf hidup meningkat, daya beli masyarakat pun meningkat sehingga menciptakan kelompok kelas menengah. Dinamisme ekonomi demografi telah menyebabkan bangkitnya kelas menengah milenial di Indonesia. Fakta ini mengharuskan perlunya masyarakat dan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan. Perumahan yang layak dan terjangkau serta sistem transportasi yang terintegrasi menjadi tumpuan kehidupan warga. Hal ini sejalan dengan Agenda Umum Pembangunan Berkelanjutan. Berakhirnya MDGs pada tahun 2015, masih terdapat sejumlah tugas yang harus diselesaikan selama periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) akan dilaksanakan hingga pada tahun 2030. Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang dilaksanakan selama kurun waktu 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Sekitar 70% dari total indikator yang mengukur tujuan MDG telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Namun beberapa indikator pengukuran sasaran di bidang kesehatan masih cukup jauh dari pencapaiannya dan perlu mendapat perhatian khusus. Target yang belum terpenuhi mencakup tingkat kemiskinan nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk,

¹⁸ OECD, "Indonesia Innovation Profile", diakses dari <http://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/OECD-Indonesia-Innovation-Profile.pdf>, diakses pada 25 Februari 2024 pukul 16:23 WIB

¹⁹ Ibid

pravalensi HIV dan AIDS serta beberapa indikator terkait lingkungan.²⁰

Meskipun MDGs berakhir pada tahun 2015, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan selama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal/SDGs*) yang akan dilaksanakan pada tahun 2030. Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang ke- telah menunjukkan kemajuan besar melalui langkah-langkah yang dilaksanakan antara tahun 2000 dan 2015. Sekitar 70 persen dari keseluruhan indikator pengukuran target MDG telah berhasil dicapai Indonesia. Namun beberapa indikator yang mengukur tujuan kesehatan masih jauh dari tercapai dan memerlukan perhatian khusus. Target yang belum terpenuhi mencakup orang yang berada di bawah garis kemiskinan nasional, kematian bayi, kematian ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi HIV dan AIDS, dan beberapa indikator lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sepakat untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).²¹

Untuk memfasilitasi implementasi SDGs, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs Sekretariat Nasional bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia. Berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil, filantropi dan dunia usaha, telah

²⁰ BPS, "Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Di Indonesia", diakses dari <https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3%20BPS%20Potret%20Awal%20TPB%20di%20Indonesia.pdf>, diakses pada 26 Februari 2024 Pukul 09:11 WIB

²¹ Sentot Bangun Widoyono, 2018, "Potret Awal Tujuan Pembanguna Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia", Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm 4

terlibat dalam berbagai proses persiapan implementasi SDGs di Indonesia. Di Indonesia, tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan meningkatnya angka kelaparan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan pokoknya, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, NTT dan Markus.

Pemerintah Indonesia berupaya menurunkan angka tersebut melalui program pembangunan, khususnya di pedesaan. Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Pangan (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan) dan Kartu Luran Jaminan Kesehatan Pendukung Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar Perguruan Tinggi, Kartu Prakerja dan kartu sembako murah, bantuan dialokasikan kepada WNI yang berhak menerimanya. Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan pengendalian impor untuk meningkatkan produk dalam negeri. Program bantuan sosial ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Indonesia juga fokus pada tujuan meningkatkan hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat, mengingat angka kematian yang sangat tinggi. Angka kematian ibu di Indonesia masih menjadi perhatian, dimana 30 persen dari setiap 1.000 ibu melahirkan di Indonesia. Selain itu, terdapat sekitar 650.000 orang yang mengidap virus HIV di Indonesia, dan diperkirakan akan semakin bertambah, serta angka kematian bayi dan anak kecil akibat gizi buruk yang cukup tinggi. Kementerian Kesehatan akan meningkatkan mutu pelayanan, mengembangka fasilitas kesehatan di daerah terpencil, meluncurkan Program Indonesia Sehat, menghidupkan kembali Posyandu, dan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan, penyuluhan dan

pengobatan di Indonesia untuk pembawa virus HIV.²²

Implementasi Kerjasama Indonesia-Swedia dalam Sweden Indonesia Sustainability Partnership 2017-2021

Pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai sebuah kesepakatan pembangunan global. Sekitar 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla yang turut mengesahkan Agenda SDGs. Memiliki tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku mulai tahun 2016 hingga 2030), untuk memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan hidup. SDGs berlaku untuk semua negara (universal), sehingga semua negara tanpa terkecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs, sebagai berikut:²³

- Tidak ada kemiskinan
- Nol Kelaparan
- Kesehatan dan kesejahteraan yang baik
- Pendidikan yang Berkualitas
- Kesetaraan gender
- Air bersih dan sanitasi
- Energi yang terjangkau dan bersih

²²https://outsco.ipb.ac.id/img/Daftar_EO_S/Essay/VnCpopT3G7W3x9E2UWh2vP9jqkmjTW_WNUzCLRCrJ.pdf, diakses pada 02 Maret 2024, Pukul 12.22 WIB

²³ Gustav Skoog, "A Closer Look At What Sweden Is Doing to Achieve SDG 13", diakses dari <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1458897/FULLTEXT01.pdf>, diakses pada 05 Maret 2024, Pukul 13:14 WIB

- Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi
- Industri, inovasi dan infrastruktur
- Mengurangi ketidakesetaraan
- Kota dan komunitas yang berkelanjutan
- Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- Aksi iklim
- Kehidupan di bawah air
- Kehidupan di darat
- Perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat Kemitraan untuk mencapai tujuan

Implementasi Indonesia-Swedien Sustainability Partnership

Swedia membantu Indonesia dengan bekerja sama adalah memberikan peluang untuk meningkatkan investasi dan perdagangan dua arah antara Indonesia dan Swedia. Kemitraan Keberlanjutan Indonesia-Swedien (SISP) bertujuan untuk memperkuat kemitraan antara para pemangku kepentingan di Indonesia dan Swedia yang sejalan dengan Agenda 2030. Swedia memimpin transisi global menuju solusi yang inovatif dan berkelanjutan dan dapat memainkan peran penting dalam ambisi Indonesia untuk mencapai tujuan Agenda 2030, menjadi pusat regional untuk industri manufaktur dan menjadi negara berpenghasilan tinggi. Target-target ambisius ini, sejalan dengan agenda reformasi Presiden Jokowi, menciptakan peluang yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan Swedia di seluruh rantai nilai. Melalui SISP sebagai platform, kedua negara telah menciptakan sarana yang sangat baik untuk memajukan dan mengintensifkan kerja sama di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama. SISP dibuat untuk membangun dunia yang lebih berkelanjutan bersama-sama. Untuk memenuhi target ambisius SDGs, Swedia dan Indonesia telah membina 10 poin untuk kolaborasi di masa depan yang diperkuat dengan perjanjian kerja sama di tingkat

pemerintah. Pekan SISP tahunan diadakan di mana para pemangku kepentingan tingkat tinggi menyelami kemajuan dan poin-poin perbaikan untuk 10 poin yang dipilih.²⁴

Swedia berada di garis depan dalam perlombaan global menuju Industri 4.0. Dengan memanfaatkan klaster industri yang berkembang di negara ini, pengetahuan Swedia dapat ditransfer ke Indonesia.

Aliansi Konstruksi Industri 4.0 berada di bidang utilitas dan konstruksi, Aliansi Konstruksi Industri 4.0 memiliki teknologi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan - misalnya untuk membantu membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia. Aliansi Energi adalah program yang diformulasikan untuk menemukan proyek-proyek di Indonesia, di daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi untuk jaringan pintar dan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, panas bumi, dan lain-lain. Aliansi ini terdiri dari perusahaan-perusahaan energi Swedia yang memiliki potensi untuk memberikan dampak yang besar di bidang energi berkelanjutan dan, secara khusus, mendukung perusahaan-perusahaan energi Swedia di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut didukung oleh Badan Energi Swedia, pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, universitas, dan lembaga keuangan Swedia (seperti EKN/SEK, Swedfund). Melalui pendekatan multi-kolaboratif dan jaringan yang kuat ini, peluang energi terbarukan yang strategis dapat diidentifikasi. Tujuannya adalah memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Swedia di bidang energi, Mendukung Indonesia dalam transisi energi dengan menyediakan teknologi, pembiayaan, dan kemampuan Swedia. Memfasilitasi implementasi teknologi Swedia yang mendukung Indonesia dalam mencapai target

²⁴ Ibid

energinya Beberapa perusahaan yang terlibat adalah:²⁵

- Supergrid Nusantara: Mengidentifikasi dan mengejar peluang bisnis dalam visi "Nusantara Supergrid"
- Kolaborasi dengan PLN: Membangun hubungan Swedia dan MoU dengan PLN untuk mengidentifikasi dan mengembangkan proyek-proyek tertentu
- Proyek energi bebas fosil: Mengidentifikasi dan mengembangkan proyek-proyek energi bebas fosil dan energi terbarukan dengan solusi dari Swedia

Indonesia berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing berbagai industri strategis nasional. Dalam hal ini, kemitraan dengan Swedia sangat penting bagi Indonesia karena kemajuan inovasi dan keunggulan teknologinya, yang dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi kemitraan di antara para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan di Indonesia, ujar Duta Besar Kamapradipta pada acara Sweden Innovation Days yang berlangsung selama tiga hari, 21-23 Maret 2023. Pekan Kemitraan Keberlanjutan tahunan Swedia-Indonesia, atau disingkat SISP, telah disorot sebagai salah satu bentuk kerja sama yang berhasil dalam bidang keberlanjutan di acara Sweden Innovation Days. Sweden Innovation Days merupakan kolaborasi dari beberapa lembaga pemerintah Swedia, seperti Vinnova, Swedish Energy Agency, dan Business Sweden, yang bertujuan untuk memperkenalkan ekosistem inovasi di Swedia sekaligus mempertemukan para inovator di seluruh dunia untuk bertukar

²⁵ Sweden-Indonesia Sustainability Partnership, "Alliances And Programs", diakses dari <https://sispalliance.com/alliances-programs/>, diakses pada 06 Mare 2024, Pukul 18:33 WIB

pikiran dan mengeksplorasi ide serta peluang kemitraan.²⁶

Pemerintah Indonesia dan Swedia telah sepakat untuk bekerja sama di empat sektor sebagai bagian dari Kemitraan Keberlanjutan Swedia-Indonesia. Keempat sektor tersebut adalah transportasi, energi, sektor kesehatan, dan industri pertambangan. Kerja sama tersebut diimplementasikan dalam penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU) dalam rangkaian acara Kemitraan Keberlanjutan Swedia-Indonesia yang berlangsung pada tanggal 6-8 Desember 2023 di Jakarta. Nota kesepahaman tersebut meliputi:²⁷

- Nota kesepahaman tentang kerja sama di bidang transportasi berkelanjutan antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Swedia,
 - MoU tentang kerja sama infrastruktur berkelanjutan di sektor transportasi, energi, pengelolaan limbah dan perawatan kesehatan antara Indonesia dan Swedia Business and Service.
 - Nota kesepahaman tentang proyek percontohan pembangkit listrik tenaga pasang surut di Indonesia Timur antara Waves4Power dan PLN Nusantara Power
 - Kemitraan Strategis dalam distribusi air bersih antara Bluewater dan PIPA.
- Indonesia-Swedia Memperkuat Bisnis Berkelanjutan

²⁶ Kemenlu RI, "Indonesia-Sweden Cooperation on Sustainability Featured as Success Story at Sweden Innovation Day", diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/en/read/4572/berita/indonesia-sweden-cooperation-on-sustainability-featured-as-success-story-at-sweden-innovation-days>, diakses pada 07 Maret 2024, Pukul 10:11 WIB

²⁷ Ibid

Duta Besar Swedia untuk Indonesia Daniel Blocker mengatakan bahwa kemitraan yang kuat antara Indonesia dan Swedia merupakan hal yang penting untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat, kerjasama Swedia-Indonesia dapat mencapai transisi ramah lingkungan yang memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan, ujangnya dalam acara Sweden -Indonesia Sustainability Partnership pada 8 Desember 2023. Komisioner Perdagangan Swedia untuk Indonesia Erik Odar juga hadir dalam forum tersebut. Odar mengatakan bahwa Swedia memiliki komitmen untuk memberikan solusi terbaru untuk mendukung transisi hijau di Indonesia. Kemitraan Berkelanjutan Swedia-Indonesia merupakan platform yang ideal untuk memperkuat kemitraan bisnis yang berkelanjutan antara Swedia dan Indonesia.²⁸

➤ Pembangkit Listrik Tenaga Pasang Surut

Indonesia dan Swedia sepakat untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga pasang surut di Indonesia Timur. Pembangkit listrik ini akan dikembangkan oleh perusahaan Swedia, Waves4Power, dan PLN Nusantara Power. Kerja sama ini terkait dengan persiapan proyek instalasi teknologi dengan melakukan uji coba terhadap ketersediaan pembangkit listrik tenaga pasang surut, tanpa merinci lebih lanjut tanggal dan lokasi proyek yang akan diuji coba di Provinsi Nusa Tenggara Timur. The Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) merupakan platform dialog berbagai pihak untuk mempromosikan kolaborasi antara Swedia

²⁸ Gusty Da Costa, "Indonesia-Sweden Agreed to Cooperate in Four Sector", diakses dari <https://indonesiabusinesspost.com/insider/indonesia-sweden-agreed-to-cooperate-in-four-sectors/>, diakses pada 08 Maret 2024, Pukul 15:46 WIB

dan Indonesia dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023. Konferensi SISP memiliki fungsi sebagai platform bagi para pemimpin dari pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk bertemu dan berbagi pengalaman di berbagai sektor dengan tema keberlanjutan.²⁹

SIMPULAN

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diadopsi oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, memberikan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet ini, baik di masa kini maupun di masa depan. Pada intinya, terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang merupakan seruan mendesak untuk dilakukan oleh semua negara - negara maju dan berkembang - dalam kemitraan global. Tujuan-tujuan ini mengakui bahwa pengentasan kemiskinan dan kekurangan lainnya harus sejalan dengan strategi untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memacu pertumbuhan ekonomi, sambil mengatasi perubahan iklim dan bekerja untuk melestarikan lautan dan hutan.

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diluncurkan dan Indonesia berkomitmen penuh terhadap implementasi dan keberhasilannya. Keberhasilan implementasi SDGs di Indonesia tidak lepas dari persoalan ketersediaan data. Badan Pusat Statistik merupakan lembaga yang berperan penting dalam pemantauan dan evaluasi SDGs. Tujuannya adalah untuk menyediakan data dan informasi mengenai indikator SDG melalui survei yang rutin dilakukan BPS atau melalui kolaborasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam penyediaan data SDG. Swedia merupakan negara yang paling awal dalam hal pemikiran keberlanjutan. Pemerintah

memperkenalkan wacana pembangunan berkelanjutan (SD) pada awal tahun 1990-an. Hingga saat itu, fokusnya adalah pada dimensi ekologi dari keberlanjutan.

Kemitraan Keberlanjutan Indonesia-Swedia (SISP) bertujuan untuk memperkuat kemitraan antara para pemangku kepentingan di Indonesia dan Swedia yang sejalan dengan Agenda 2030. Swedia memimpin transisi global menuju solusi yang inovatif dan berkelanjutan dan dapat memainkan peran penting dalam ambisi Indonesia untuk mencapai tujuan Agenda 2030, menjadi pusat regional untuk industri manufaktur dan menjadi negara berpenghasilan tinggi. Target-target ambisius ini, sejalan dengan agenda reformasi Presiden Jokowi, menciptakan peluang yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan Swedia di seluruh rantai nilai. Melalui SISP sebagai platform, kedua negara telah menciptakan sarana yang sangat baik untuk memajukan dan mengintensifkan kerja sama di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama. SISP dibuat untuk membangun dunia yang lebih berkelanjutan bersama-sama. Untuk memenuhi target ambisius SDGs, Swedia dan Indonesia telah membina 10 poin untuk kolaborasi di masa depan yang diperkuat dengan perjanjian kerja sama di tingkat pemerintah.

Pemerintah Indonesia dan Swedia telah sepakat untuk bekerja sama di empat sektor sebagai bagian dari Kemitraan Keberlanjutan Swedia-Indonesia. Keempat sektor tersebut adalah transportasi, energi, sektor kesehatan, dan industri pertambangan. Kerja sama tersebut diimplementasikan dalam penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU) dalam rangkaian acara Kemitraan Keberlanjutan Swedia-Indonesia yang berlangsung pada tanggal 6-8 Desember 2023 di Jakarta. Nota kesepahaman tersebut meliputi:³⁰

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

- Nota kesepahaman tentang kerja sama di bidang transportasi berkelanjutan antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Swedia,
- MoU tentang kerja sama infrastruktur berkelanjutan di sektor transportasi, energi, pengelolaan limbah dan perawatan kesehatan antara Indonesia dan Swedia Business and Service.
- Nota kesepahaman tentang proyek percontohan pembangkit listrik tenaga pasang surut di Indonesia Timur antara Waves4Power dan PLN Nusantara Power
- Kemitraan Strategis dalam distribusi air bersih antara Bluewater dan PIPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Burchill, Scoot. 2001. *Theories of international Relations*. New York: Palgrave.
- Creswell, J.,W. 2007. *Research design. Qualitative and mixed methods approaches*. London: Sage.
- Gooding, Robert E. 2010. *the Oxford Handbook of International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Hammersley, M. 2013. *What is Qualitative Research?* London dan New York: Bloomsbury.
- Holsti K.J. 1992, *International Politics. A Framework for Analysis, 6th*, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Jack Donnelly, 2008, *The Ethics of Realism*, didalam The Oxford andbook of International Relations, London: Oxford University Press.
- Kegley, Charles W. Jr.,& Wittkopf, Eugene R. 1995. *World Politics: Trend and Transformation*. New York: St. Martin's Press.
- A.M. Slaughter, 2011, *International Relations, Principal Theories*. Dari https://www.princeton.edu/~slaughter/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf pada 26 April 2020, pukul 12.55 WIB
- Alisjahbana, A. S., dan Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi* (PDF). Bandung: Unpad Press. Hlm. 44
- Sweden and the 2030 Agenda — Report to the UN High Level Political Forum 2017 on Sustainable Development. Hal. 3 Melalui <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16033Sweden.pdf>
- Marieska Harya Viradhani, 2021, <https://www.jawapos.com/internasional/23/11/2021/swedia-indonesia-perkuat-kerja-sama-dalam-lima-bidang-ini/>
- SISP Day 1 - SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND JOB CREATION. Sweden Jakarta. Melalui <https://www.youtube.com/watch?v=1YVCP74CkWA>
- Sweden and the 2030 Agenda, Op.Cit, hlm. 5

<https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg>

diakses pada 28 Februari 2024,
Pukul 17.15 WIB

Widjajanti, dkk. (2014). Pemahaman Pendidikan Konsumsi Berkelanjutan: Rekomendasi Nasional dan Panduan Bagi Pengambil Kebijakan dan Pendidik (PDF). Yayasan Pembangunan Berkelanjutan dan United Nations of Environment Programme. hlm. 16.

Bagas Hapsoro, "Sweden-Indonesia: Shared Experiences, Shared Outlook", diakses dari <https://kemlu.go.id/stockholm/en/news/1015/sweden-indonesia-shared-experiences-shared-outlook>, diakses pada 26 Februari 2024, pukul 07:11 WIB

OECD, "Indonesia Innovation Profile", diakses dari <http://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/OECD-Indonesia-Innovation-Profile.pdf>, diakses pada 25 Februari 2024 pukul 16:23 WIB

BPS, "Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Di Indonesia", diakses dari <https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3%20BPS%20Potret%20Awal%20TPB%20di%20Indonesia.pdf>, diakses pada 26 Februari 2024 Pukul 09:11 WIB

Bagas Hapsoro, "Sweden-Indonesia: Shared Experiences, Shared Outlook", diakses dari <https://kemlu.go.id/stockholm/en/news/1015/sweden-indonesia-shared-experiences-shared-outlook>, diakses pada 26 Februari 2024, pukul 07:11 WIB

BPS, "Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)", diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/48852-ID-kajian-indikator-sustainable-development-goals.pdf>,